

# RENCANA KERJA BPPHLHK JABALNUSRA

# 2024





**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
WILAYAH JAWA BALI NUSA TENGGARA

Jl. Bandara Juanda No. 100, Sidoarjo 51253 Telp. (031) 8662173 Fax. (031) 8673687

---

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM  
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH JAWA BALI NUSA TENGGARA**

**NOMOR : SK. 182/ BPPHLHK/ TU/ 11/ 2023**

Tentang

**PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA)  
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
WILAYAH JAWA BALI NUSA TENGGARA TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
WILAYAH JAWA BALI NUSA TENGGARA**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.51/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Eselon I selaku penanggung jawab Program dan Eselon II serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) selaku penanggung jawab kegiatan untuk menyusun Rencana Kerja yang berpedoman pada Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara tentang Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 s/d 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanann Republik Indonesai Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanann (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanann Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanann Republik Indonesia Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanann;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanann Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanann.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH JAWA BALI NUSA TENGGARA TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH JAWA BALI NUSA TENGGARA TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja (RENJA) Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2024, dengan ketentuan akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Sidoarjo  
Pada tanggal : 1 November 2023

Kepala Balai,



Taqiuddin, S.Hut., M.P  
NIP. 19740628 199903 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK, Jakarta;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK, Jakarta;
3. Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal Kementerian LHK, Jakarta.



## KATA PENGANTAR

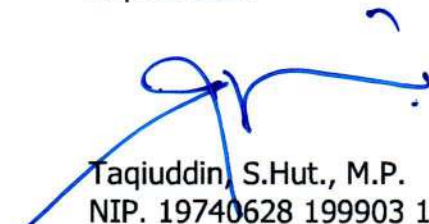
Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK (BPPHLHK) Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara berkomitmen untuk mewujudkan intitusi yang akuntabel, efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan menyusun dokumen Rencana Kerja BPPHLHK Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara untuk Tahun 2024 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.51/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2017 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dokumen ini merupakan pedoman dan arahan umum dalam mendukung pelaksanaan kegiatan di BPPHLHK Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara untuk Tahun anggaran 2024. Dokumen ini berisikan informasi mengenai target kinerja berupa keluaran (output) dan atau dampak yang ingin diwujudkan oleh BPPHLHK dalam satu Tahun anggaran. Selain itu dokumen Rencana Kerja Tahun 2024 ini disusun untuk mendukung program kerja Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada khususnya serta mendukung pencapaian kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada umumnya.

Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Rencana Kerja BPPHLHK Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Tahun 2024.

Akhir kata, demi kesempurnaaan kami selaku pimpinan BPPHLHK Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara mengharapkan kritikan, saran dan masukan dari semua pihak demi suksesnya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dijabarkan dalam Rencana Kerja ini. Semoga Rencana Kerja Tahun 2024 yang telah disusun ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh semua pihak di lingkup BPPHLHK Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.

Sidoarjo, November 2023  
Kepala Balai

  
Taquiddin, S.Hut., M.P.  
NIP. 19740628 199903 1 002



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
BAB I .....	5
PENDAHULUAN .....	5
A. Latar Belakang .....	5
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi .....	6
C. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia .....	7
D. Sarana dan Prasarana .....	11
E. Pengarasutamaan Gender .....	12
BAB II .....	14
CAPAIAN KINERJA DAN PROGNOSIS .....	14
A. Capaian Indikator Kinerja.....	14
B. Capaian Serapan Anggaran .....	24
BAB III.....	29
RENCANA KERJA TAHUN 2024.....	29
A. Strategi Dalam Mendukung Program KLHK dan Program Prioritas Nasional .....	29
B. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan, Output, Lokasi dan Komponen .....	32
C. Pendanaan Tahun 2024 .....	37
BAB IV .....	39
PENUTUP.....	39

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara .....	8
Gambar 2 Wilayah Kerja BPPHLHK Jabalnusra .....	4
Gambar 3 Jumlah Pegawai BPPHLHK Wilayah Jabalnusra .....	9
Gambar 4 Jumlah Pegawai BPPHLHK Wilayah Jabalnusra Berdasarkan Gender .....	9
Gambar 5 Jumlah Pegawai BPPHLHK Jabalnusra Berdasarkan Riwayat Pendidikan .....	10
Gambar 6 Jumlah Pegawai BPPHLHK Jabalnusra Berdasarkan Golongan .....	10
Gambar 7 Grafik Capaian Kinerja IKK Layanan Dukman Th. 2020-2022 .....	17
Gambar 8 Grafik Capaian Kinerja IKK Layanan Perkantoran Th. 2020-2022 .....	17
Gambar 9 Grafik Capaian Kinerja IKK Jumlah Operasi Pengamanan Kawasan Hutan Th. 2020-2022 .....	18
Gambar 10 Grafik Capaian Kinerja IKK Jumlah operasi Peredaran Hasil Hutan Ilegal Th. 2020-2022 .....	18
Gambar 11 Grafik Capaian Kinerja IKK Jumlah Polhut yang Ditingkatkan Kapasitasnya Th. 2020-2022 ..	19
Gambar 12 Grafik Capaian Kinerja IKK Jumlah PPSA yang ditangani Th. 2020-2022 .....	19
Gambar 13 Grafik Capaian Kinerja IKK Jumlah PPLH yang Ditingkatkan Kapasitasnya Th. 2020-2022 ..	20
Gambar 14 Grafik Capaian Kinerja IKK Jumlah Kasus Pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P-21 Th. 2020-2022 .....	20
Gambar 15 Grafik Capaian Kinerja IKK Jumlah PPNS yang Ditingkatkan Kapasitasnya Th. 2020-2022 ...	21
Gambar 16 Grafik Capaian Serapan Anggaran Th. 2020-2022 .....	25
Gambar 17 Kerangka Pikir Tema RKP Tahun 2024 .....	29
Gambar 18 Prioritas Nasional Tahun 2023 .....	30
Gambar 19 Prioritas Nasional Tahun 2023 .....	30
Gambar 20 Strategi BPPHLHK Wilayah Jabalnusra .....	31
Gambar 21 Struktur Anggaran BPPHLHK Jabalnusra TA. 2024 .....	37
Gambar 22 Struktur Anggaran BPPHLHK Jabalnusra TA. 2024 Berdasarkan Sumber Dana .....	37



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Sebaran Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin .....	11
Tabel 2 Sarana dan Prasarana BPPHLHK Wilayah Jabalnusra .....	11
Tabel 3 Rincian Usulan Target IKK berdasarkan Renstra Balai Tahun 2020-2024.....	14
Tabel 4 Rekapitulasi Capaian Kinerja IKK BPPHLHK Tahun 2020 – 2022 .....	16
Tabel 5. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2023 Semula .....	21
Tabel 6 Perubahan IKK dan Target IKK sampai dengan Akhir Tahun 2023.....	22
Tabel 7 Prognosis Capaian Kinerja Tahun 2023.....	23
Tabel 8 Capaian Serapan Anggaran Tahun 2020-2022 .....	24
Tabel 9 Rekapitulasi DIPA BPPHLHK Wilayah Jabalnusra Tahun 2023.....	25
Tabel 10 Anggaran dan Realisasi DIPA BPPHLHK Wilayah Jabalnusra Tahun 2023 .....	27
Tabel 11 Prognosis Realisasi Anggaran Menurut Jenis Belanja sampai dengan akhir Desember 2023.....	28
Tabel 12 Proyek Prioritas Nasional BPPHLK Wilayah Jabalnusra Tahun 2024.....	32
Tabel 13 Proyek Non-Prioritas Nasional BPPHLK Wilayah Jabalnusra Tahun 2024.....	33
Tabel 14 Rincian Kegiatan BPPHLHK Wilayah Jabalnusra Tahun 2024 .....	35
Tabel 15 Anggaran Tahun 2024 Berdasarkan Sumber Dana.....	37
Tabel 16 Pagu Alokasi Tahun 2024 BPPHLHK Wilayah Jabalnusra per-KRO .....	38





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara mempunyai peranan penting untuk mewujudkan *output*, target dan juga *outcome* dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang tertuang dalam Rencana Strategis KLHK maupun Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum dan Lingkungan Tahun 2020-2024.

Sesuai dengan Permen LHK Nomor 13 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BPPHLK Jawa, Bali, Nusa Tenggara mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

Sebagai salah satu upaya BPPHLHK Jawa, Bali, Nusa Tenggara agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat terlaksana dengan efektif, efisien, akuntabel serta sejalan dengan target dan prioritas nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang dan peraturan yang berlaku, maka setiap Tahun BPPHLHK menyusun rencana kerja (RENJA).

Rencana Kerja BPPHLK Jawa, Bali, Nusa Tenggara Tahun 2024 ini disusun untuk memberikan gambaran singkat mengenai sasaran yang akan dicapai, kebijakan, program dan juga kegiatan yang menjadi prioritas dari BPPHLHK Jawa, Bali, Nusa Tenggara selama Tahun anggaran 2024 dalam rangka membantu pencapaian sasaran prioritas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Proyek Prioritas Nasional di dalam Rencana Kerja Pemerintah Republik Indonesia.

Dokumen RENJA Tahun 2024 ini nantinya digunakan sebagai kerangka acuan kerja dan salah satu acuan pengukuran kinerja BPPHLK Jawa, Bali, Nusa Tenggara. Selain itu, Renja Tahun 2024 ini digunakan untuk memberikan arahan kebijakan



penyelenggaraan kegiatan BPPHLK pada Tahun 2024 dan mendukung keberhasilan penyelenggaraan kegiatan dan pembangunan Ditjen PHLHK serta KLHK.

Rencana Kerja (RENJA) Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.51/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selain itu dalam penyusunan dokumen RENJA ini juga mengacu pada Rencana Kerja Strategis Balai PPHLHK Jabalnusra yang telah disusun Tahun 2020-2024, Rencana strategis Ditjen PHLHK Tahun 2020-2024 serta Rencana strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024.

Selain berpedoman pada dokumen perencanaan yang telah disebutkan di atas, Rencana Kerja Tahun 2024 juga mengacu pada hasil evaluasi serta capaian kegiatan BPPHLHK Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara pada Tahun 2023.

## B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. BPPHLK Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara menyelenggarakan pengamanan dan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

BPPHLHK Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPPHLHK Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara menyelenggarakan fungsi antara lain sebagai berikut :

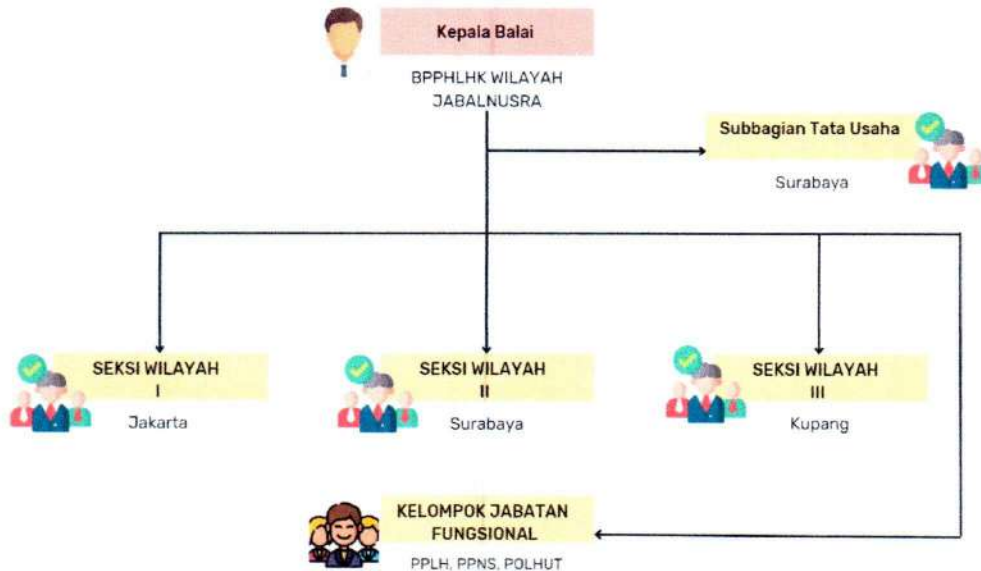
- a. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi potensi gangguan lingkungan hidup dan kehutanan;

- b. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi potensi ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. Sosialisasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. Koordinasi dengan aparat penegak hukum dan pihak terkait lainnya;
- e. Pengumpulan data dan informasi pencegahan dan pengamanan hutan;
- f. Pelaksanaan kegiatan pencegahan dan operasi pengamanan hutan;
- g. Pemberian dukungan dan pelaksanaan operasi penindakan perusakan lingkungan hidup;
- h. Pengumpulan bahan dan keterangan, serta penyidikan terhadap pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
- i. Fasilitasi dan pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
- j. Pengawasan penataan terhadap pemegang perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah, dan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- k. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan; dan
- l. Pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, dan pengelolaan data dan informasi.

## C. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

### 1. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi BPPHLHK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara

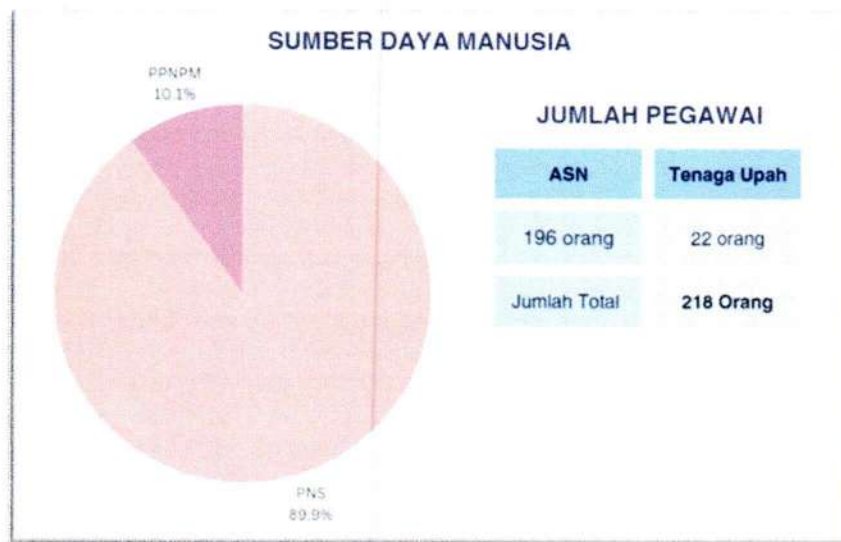
Berdasarkan Peraturan tersebut bahwa Kantor Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum berada di Surabaya, Seksi Wilayah I Jakarta, Seksi Wilayah II Surabaya, dan Seksi Wilayah III Kupang. Selain itu, BPPHLHK Wilayah Jabalnusra juga mempunyai beberapa pos penegakan hukum yang berlokasi di beberapa kota yaitu Pos Bandung, Semarang, Yogyakarta, Denpasar, Mataram, dan Labuhan Bajo.



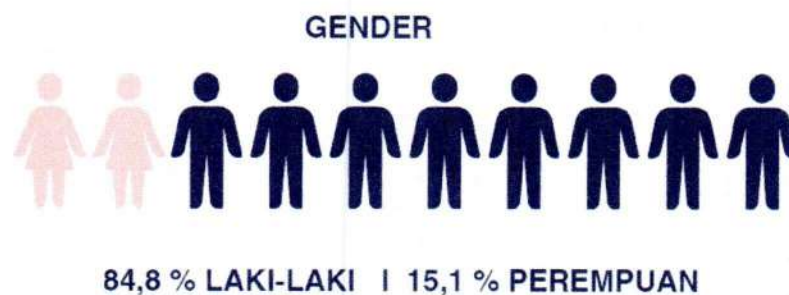
Gambar 2. Wilayah Kerja BPPHLHK Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara

## 2. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya BPPHLK Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara didukung oleh sumber daya manusia. Jumlah pegawai BPPHLK Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara periode sampai akhir Desember 2023 sebanyak 218 orang terdiri dari 196 orang dengan status Aparatur Sipil Negara (ASN), dan sebanyak 22 orang dengan status tenaga upah. Jika dihitung berdasarkan gender, jumlah pegawai laki lebih banyak daripada pegawai perempuan. Jumlah pegawai laki-laki yaitu 185 orang sedangkan perempuan sebanyak 33 orang.

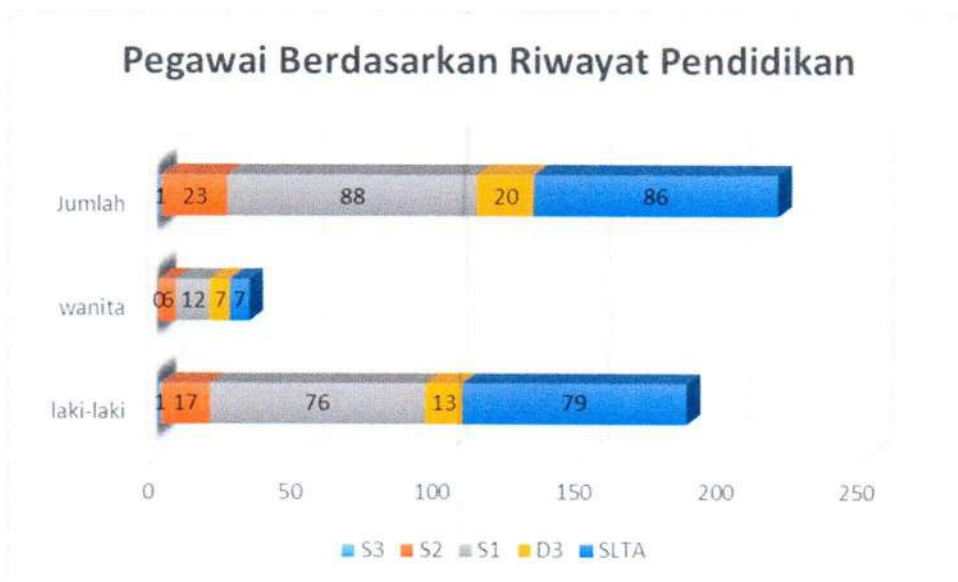


Gambar 3 Jumlah Pegawai BPPHLK Wilayah Jabalnusra



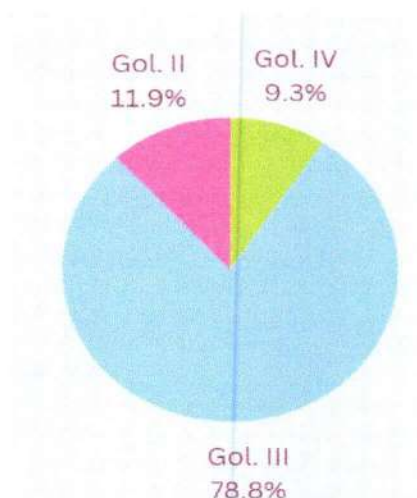
Gambar 4 Jumlah Pegawai BPPHLK Wilayah Jabalnusra Berdasarkan Gender

Latar belakang pendidikan pegawai terdiri dari lulusan S3 sebanyak 1 (satu) orang, S2 sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang, S1 sebanyak 88 (delapan puluh delapan) orang, DIII sebanyak 22 (dua puluh) orang, dan SLTA sebanyak 86 (delapan puluh enam) orang. Detil data terpilah pegawai berdasarkan riwayat pendidikan dan jenis kelamin dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 5 Jumlah Pegawai BPPHLK Wilayah Jabalnusra Berdasarkan Riwayat Pendidikan

Apabila dikategorikan berdasarkan golongan, pegawai BPPHLK Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara sebanyak 146 orang golongan III, dan golongan II sebanyak 31 orang.



Gambar 6 Jumlah Pegawai BPPHLK Wilayah Jabalnusra Berdasarkan Golongan

Kantor BPPHLK Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara berlokasi pada 3 (tiga) kota, yaitu seksi I yang berkantor di Jakarta (DKI Jakarta), TU dan Seksi II berkantor di Surabaya (Jawa Timur), dan seksi III yang berkantor di Kupang (NTT). Selain kantor seksi, pegawai BPPHLK juga ada yang berkantor beberapa di pos gakum. Adapun sebaran pegawai untuk masing – masing seksi dan pos gakum dapat dilihat pada tabel 1 berikut :

Tabel 1 Sebaran Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

LOKASI	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	WANITA	LAKI-LAKI	
Jakarta	9	39	48
Surabaya	17	61	78
Kupang	2	14	16
Pos Bandung	1	13	14
Pos Yogyakarta	2	13	15
Pos Semarang	-	8	8
Pos Labuhan Bajo	-	15	15
Pos Mataram	-	15	15
Pos Denpasar	1	8	9

## D. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung kinerja BPPHLHK Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Pada akhir Tahun 2023, jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BPPHLHK Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara tersaji dalam tabel 2 berikut:

Tabel 2 Sarana dan Prasarana BPPHLHK Wilayah Jabalnusra

No	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
1	Mobil Patroli/Intelejen	21 unit
2	Mobil Pengawas	1 unit
3	Mobil Tahanan	1 unit
4	Motor Patroli	21 unit
5	Sepeda motor patroli	20
6	Drone	7 unit
7	GPS	32 unit
8	Laptop	138 unit
9	Senjata Api	31 pucuk

Pada akhir Tahun 2023, total nilai Barang Milik Negara (BMN) pada BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara sampai akhir Oktober 2023 adalah sebesar Rp. 52.391.470.582,- terdiri dari Tanah Bangunan Kantor sebesar Rp. 10.532.438,- peralatan dan mesin sebesar Rp. 34.457.679.839,- Gedung dan Bangunan sebesar

Rp. 7.036.773.913,- Irigasi sebesar Rp. 110.102.000,- Jaringan sebesar Rp. 44.848.000,- dan Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan sebesar Rp. 209.628.830,-.

## E. Pengarasutamaan Gender



Pengarasutamaan gender merupakan rangkaian strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam pengembangan institusi, kebijakan dan program kerja, termasuk pelaksanaan kebijakan, program, monitoring dan evaluasi, serta dalam kerjasama dengan pihak luar atau pihak eksternal.

Pengarasutamaan gender bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan.

Pada Tahun 2023, BPPHLHK Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara berkomitmen untuk melaksanakan PUG yang diimplementasikan melalui beberapa bentuk kegiatan diantaranya yaitu:

- Pemuatan mengenai PUG di Rencana Strategis BPPHLHK Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara Tahun 2020-2024;
- Penyediaan anggaran responsif gender di RKA-KL Tahun 2023;
- Pembentukan Sub Pokja PUG lingkup BPPHLHK Wilayah Jabalnusra;
- Penunjukan *Focal Point*, *Gender Champion* PUG lingkup BPPHLHK Jabalnusra;
- Edaran mengenai penguatan implementasi PUG lingkup BPPHLHK Jabalnusra;
- Penyusunan Rencana Aksi PUG;
- Perbaikan sarana dan prasana yang responsif gender.



- Mengikutsertakan pegawai BPPHLHK Jabalnusra untuk mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran yang responsif gender.

Sedangkan untuk Tahun 2024, BPPHLHK Wilayah Jabalnusra telah menyediakan anggaran yang berbasis gender di RKA-KL di dalam program dukungan manajemen. Anggaran tersebut direncanakan untuk mendukung pelaksanaan beberapa kegiatan yang mendukung pengarasutamaan gender.

Kegiatan yang direncanakan pada Tahun 2024 yaitu :

- Edaran mengenai penguatan implementasi PUG lingkup BPPHLHK Wilayah Jabalnusra
- Penyusunan Rencana Aksi PUG Tahun 2024
- Perbaikan sarana dan prasana perkantoran yang responsif gender
- Peningkatan kapasitas terkait pengarasutamaan gender.



## BAB II

# CAPAIAN KINERJA DAN PROGNOSIS

### A. Capaian Indikator Kinerja

#### 1. Capaian Kinerja Tahun 2020 - 2022

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK melaksanakan upaya-upaya preemtif, preventif, represif dan yustisi yang mendukung rencana strategis penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan Tahun 2020 – 2024. Upaya tersebut diukur, dimonitor dan dievaluasi setiap Tahunnya melalui pemantauan capaian Indikator Kinerja Kegiatan yang dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, baik dalam Renstra maupun dalam Renja BPPHLHK Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara.

Pengukuran capaian kinerja tersebut digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi KLHK, serta mendukung terwujudnya sasaran strategis KLHK.

BPPHLHK Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara telah menyusun rencana target pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan selama 5 (lima) tahun yang termuat dalam dokumen Renstra BPPHLHK Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara Tahun 2020-2024. Rincian target capaian IKK dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3 berikut :

Tabel 3 Rincian Usulan Target IKK berdasarkan Renstra BPPHHK Jabalnusra Tahun 2020-2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (SATUAN)	TARGET CAPAIAN IKK				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya Reformasi Tata Kelola	Layanan Dukungan Manajemen UPT (Layanan)	1	1	1	1	1



NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (SATUAN)	TARGET CAPAIAN IKK				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Kepemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pene-gakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Layanan Perkantoran (Layanan)	1	1	1	1	1
2.	Terlaksananya Pencegahan dan Pengaman Hutan terhadap gang-guan dan anc-aman hutan di 34 Provinsi	Jumlah Operasi Pengamanan Kawasan Hutan (Operasi)	11	14	16	18	20
		Jumlah Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal (Operasi)	21	47	56	71	75
		Jumlah Polhut yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	0	105	109	112	116
3.	Meningkatnya efektivitas Penanganan Pengaduan, Pengawasan izin lingkungan dan izin PPLH dan PUU, ketaatan terhadap Sanksi Administrasi	Pengaduan , Pengawasan, dan Sanksi Administrasi yang ditangani (Perusahaan)	170	255	288	331	357
		Pengaduan , Pengawasan, dan Sanksi Administrasi yang ditangani terkait DAS Citarum (Perusahaan)	40	66	76	87	92
4.	Meningkatnya efektivitas Penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan	Jumlah kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P-21 (Kasus)	24	38	44	49	59
		Jumlah PPNS yang ditingkatkan kapasitasnya (orang)	4	5	5	8	8

Dari tabel rencana target capaian IKK tersebut di atas, BPPHLHK Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara menjabarkan kembali rencana kerja dan juga target capaian IKK setiap tahunnya dalam dokumen Rencana Kerja (Renja). Namun demikian, terdapat perbedaan perencanaan capaian IKK antara perencanaan dalam Renstra dan dokumen Renja setiap tahun. Hal ini dikarenakan perbedaan proyeksi ketersediaan anggaran

pada saat awal perencanaan dalam dokumen Renstra dengan data pada saat penyusunan Renja setiap Tahun. Selain penyesuaian target IKK, nomenklatur dari IKK juga mengalami penyesuaian apabila dibandingkan dengan perencanaan IKK yang ada di Renstra

Capaian kinerja untuk setiap IKK BPPHLHK Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 disajikan tabel rekapitulasi capaian berikut :

Tabel 4 Rekapitulasi Capaian Kinerja IKK BPPHLHK Wilayah Jabalnusra Tahun 2020 – 2022

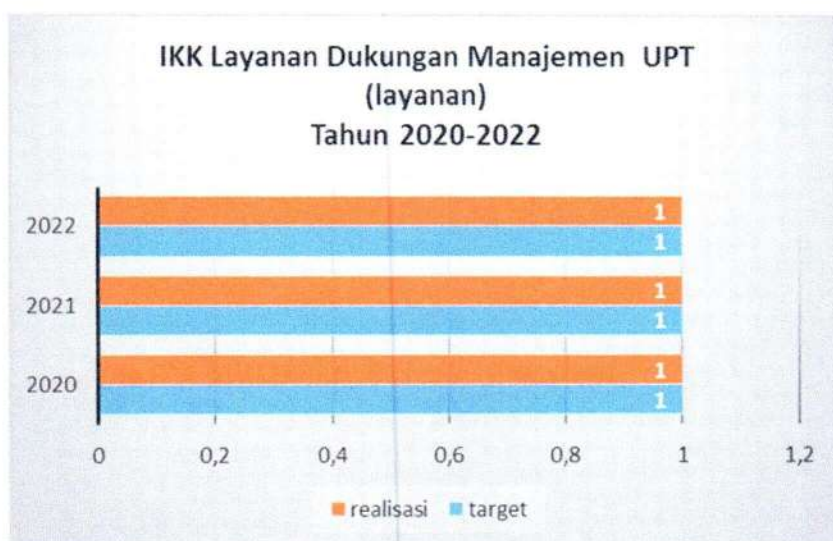
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (SATUAN)	TARGET CAPAIAN IKK & REALISASI TAHUN 2020 - 2022					
			2020		2021		2022	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Layanan Dukungan Manajemen UPT (Layanan)	1	1	1	1	1	1
		Layanan Perkantoran (Layanan)	1	1	1	1	1	1
2	Terlaksananya Pencegahan dan Pengaman Hutan terhadap gangguan dan ancaman hutan di 34 Provinsi	Jumlah Operasi Pengamanan Kawasan Hutan (Operasi)	-	-	7	21	4	7
		Luas Kawasan Hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan (Ha)	110.000	750.293,48	-	-	-	-
		Jumlah Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal (Operasi)	12	14	5	16	6	9
		Jumlah Polhut yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	3	3	60	113	40	119
3	Meningkatnya efektivitas Penanganan Pengaduan, Pengawasan izin lingkungan dan izin PPLH dan PUU, ketaatan terhadap Sanksi Administrasi	Pengaduan , Pengawasan, dan Sanksi Administrasi yang ditangani (Perusahaan)	113	122	88	129	98	101
		PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya (orang)	-	-	5	17	5	27
4	Meningkatnya efektivitas Penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan	Jumlah kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P-21 (Kasus)	15	40	28	34	24	27
		Jumlah PPNS yang ditingkatkan kapasitasnya (orang)	3	3	4	4	4	10

Pada rentang waktu antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 terdapat beberapa perubahan IKK. Perubahan tersebut yakni perubahan satuan target untuk IKK Luas Kawasan hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan. Semula satuan IKK menggunakan (Ha) kemudian diganti menjadi jumlah operasi. Selain itu, mulai tahun 2021 juga terdapat IKK baru yaitu PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya

(orang), sedangkan penghitungan IKK Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi yang ditangani terkait DAS Citarum (Perusahaan) digabung menjadi satu dengan data perusahaan yang tidak terkait dengan DAS Citarum.

Adapun grafik perbandingan capaian kegiatan untuk setiap IKK pada masing-masing sasaran kegiatan antara Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- a. Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Kepemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Dalam sasaran kegiatan ini ada 2 IKK yaitu IKK Layanan Dukungan Manajemen UPT dengan satuan targetnya adalah layanan. IKK yang kedua yaitu IKK Layanan Perkantoran dengan satuan target IKK adalah layanan.



Gambar 7 Grafik Capaian Kinerja IKK Layanan Dukman Th. 2020-2022



Gambar 8 Grafik Capaian Kinerja IKK Layanan Perkantoran Th. 2020-2022

b. Sasaran Kegiatan : Terlaksananya Pencegahan dan Pengamanan Hutan terhadap gangguan dan ancaman hutan di 34 Provinsi.

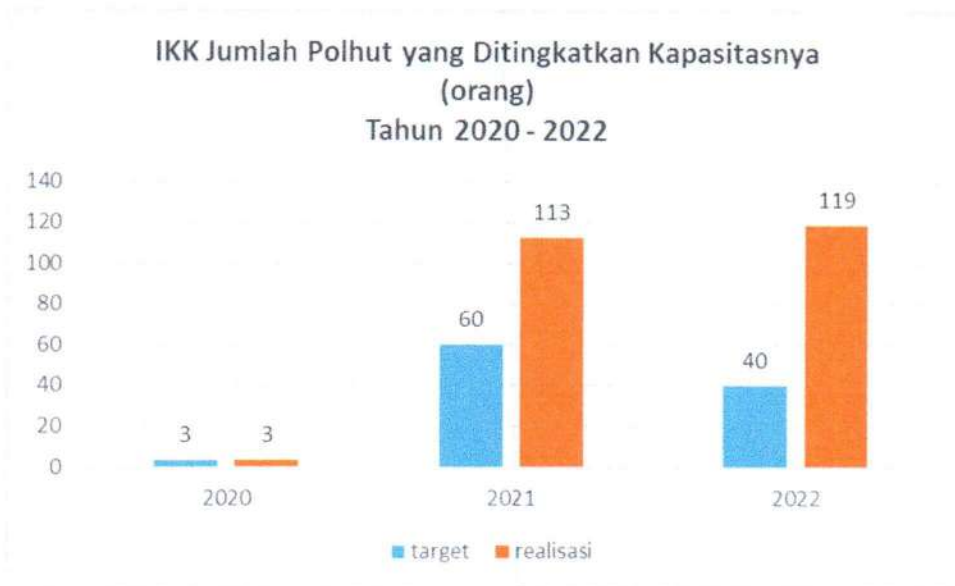
Pada sasaran kegiatan ini terdapat IKK 3 IKK, yaitu : luas kawasan hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan (Ha), jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal dan jumlah polhut yang ditingkatkan kapasitasnya. Namun demikian mulai Tahun 2021, pada sasaran kegiatan ini terdapat perubahan nomenklatur IKK dan juga satuan target. IKK luas kawasan hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan (Ha) berubah menjadi Jumlah Operasi Pengamanan Kawasan Hutan dengan satuan target jumlah operasi. Grafik capaian IKK tersebut mulai dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :



Gambar 9 Grafik Capaian Kinerja IKK Jumlah Operasi Pengamanan Kawasan Hutan Th. 2020-2022



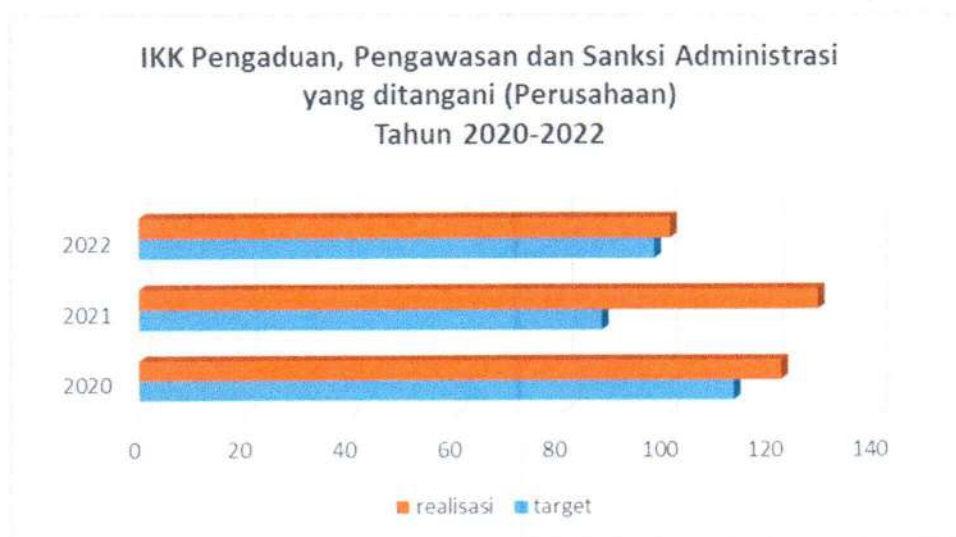
Gambar 10 Grafik Capaian Kinerja IKK Jumlah operasi Peredaran Hasil Hutan Ilegal Th. 2020-2022



Gambar 11 Grafik Capaian Kinerja IKK Jumlah Polhut yang Ditingkatkan Kapasitasnya Th. 2020-2022

c. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya efektivitas Penanganan Pengaduan, Pengawasan izin lingkungan dan izin PPLH dan PUU, ketaatan terhadap Sanksi Administrasi

Untuk sasaran kegiatan ini terdapat 2 IKK yaitu pengaduan, pengawasan dan sanksi administrasi yang ditangani dengan satuan target perusahaan serta IKK yang kedua yang merupakan IKK tambahan mulai Tahun 2021. IKK tambahan dimaksud yaitu PPLH yang ditingkakan kapasitasnya. Detil capaian untuk tiap IKK pada sasaran ini adalah sebagai berikut :



Gambar 12 Grafik Capaian Kinerja IKK Jumlah PPSA yang ditangani Th. 2020-2022



Gambar 13 Grafik Capaian Kinerja IKK Jumlah PPLH yang Ditingkatkan Kapasitasnya Th. 2020-2022

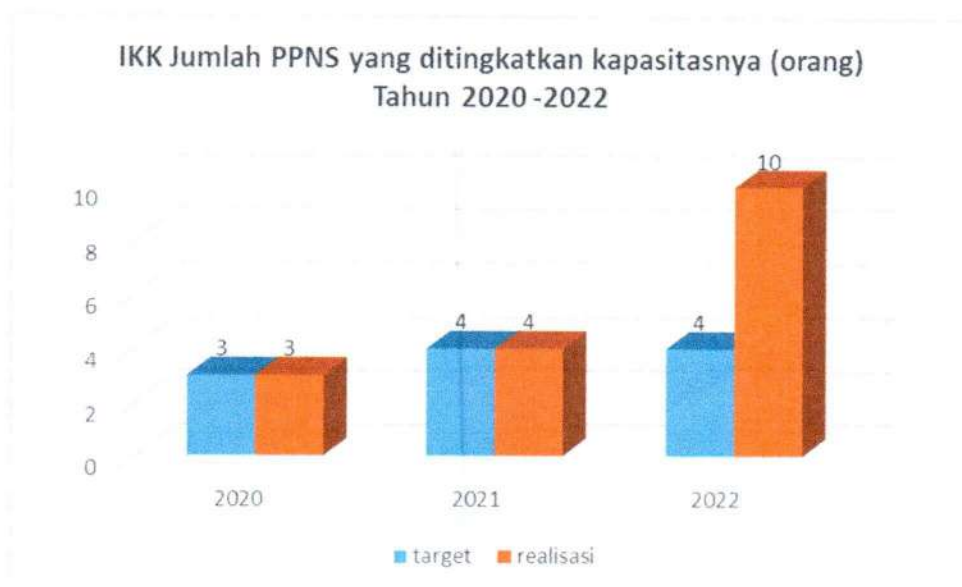
d. Sasaran Kegiatan : Meningkatnya efektivitas Penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan

Untuk sasaran kegiatan ini ada 2 IKK yaitu jumlah kasus pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P-21 dengan satuan target kasus untuk IKK pertama. IKK kedua yaitu jumlah PPNS yang ditingkatkan kapasitasnya dengan satuan target orang. Grafik capaian kinerja untuk masing-masing IKK dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :



Gambar 14 Grafik Capaian Kinerja IKK Jumlah Kasus Pidana LHK yang Diselesaikan sampai dengan P-21 Th. 2020-2022





Gambar 15 Grafik Capaian Kinerja IKK Jumlah PPNS yang ditingkatkan kapasitasnya  
Th. 2020-2022

## 2. Prognosis Capaian Kinerja Tahun 2023

Indikator Kinerja Kegiatan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara pada Tahun 2023 serta target, antara lain adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2023 Semula

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN IKK TAHUN 2023
1.	Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Kepemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pene-gakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1 Layanan
		Layanan Perkantoran	1 Layanan
2.	Terlaksananya Pencegahan dan Pengaman Hutan terhadap gang-guan dan ancaman hutan di 34 Provinsi	Jumlah Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	3 Operasi
		Jumlah Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	4 Operasi
		Peningkatan Kapasitas Polisis Kehutanan	15 Orang

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN IKK TAHUN 2023
3.	Meningkatnya efektivitas Penanganan Pengaduan, Pengawasan izin lingkungan dan izin PPLH dan PUU, ketaatan terhadap Sanksi Administrasi	Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Bidang LHK	124 Perusahaan
		PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya	10 Orang
4.	Meningkatnya efektivitas Penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan	Kasus tindak pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P.21	31 Kasus
		Kapasitas PPNS LHK yang ditingkatkan	5 Orang

Pada pertengahan Tahun, BPPHLHK Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara mendapatkan tambahan anggaran PNPB yang menyebabkan adanya penambahan target pada beberapa IKK dan juga penambahan IKK baru. IKK baru ditambahkan karena adanya kewenangan baru yang didelegasikan kepada BPPHLHK Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Kewenangan tersebut yaitu penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan kehutanan.

IKK serta target BPPHLHK Wilayah Jabalnusra pada akhir Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 6 Perubahan IKK dan Target IKK sampai dengan Akhir Tahun 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	IKK TAHUN 2023	
			SEMULA	MENJADI
1	Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Kepemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1 Layanan	1 Layanan
		Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan
2	Terlaksananya Pencegahan dan Pengaman Hutan terhadap gangguan dan ancaman hutan di 34 Provinsi	Jumlah Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	3 Operasi	6 Operasi
		Jumlah Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	4 Operasi	5 Operasi
		Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan	15 Orang	15 Orang

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	IKK TAHUN 2023	
			SEMULA	MENJADI
3	Meningkatnya efektivitas Penanganan Pengaduan, Pengawasan izin lingkungan dan izin PPLH dan PUU, ketaatan terhadap Sanksi Administrasi	Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Bidang LHK	124 Perusahaan	159 Perusahaan
		PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya	10 Orang	10 Orang
4	Meningkatnya efektivitas Penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan	Kasus tindak pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P.21	31 Kasus	32 Kasus
		Kapasitas PPNS LHK yang ditingkatkan	4 Orang	5 Orang
		Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani	-	2 perkara

Dari IKK yang telah direvisi tersebut maka prognosis capaian kinerja untuk Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 7 Prognosis Capaian Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	PROGNOSIS CAPAIAN VOLUME	PROGNOSIS CAPAIAN (%)
1	Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pene-gakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1 Layanan	1 Layanan	100%
		Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100%
2	Terlaksananya Pencegahan dan Pengaman Hutan terhadap gang-guan dan ancaman hutan di 34 Provinsi	Jumlah Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	6 Operasi	6 Operasi	100%
		Jumlah Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	5 Operasi	5 Operasi	100%
		Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan	15 Orang	15 Orang	100%
3	Meningkatnya efektivitas Penanganan Pengaduan, Pengawasan izin lingkungan dan izin PPLH dan PUU, ketaatan terhadap Sanksi	Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Bidang LHK	159 Perusahaan	159 Perusahaan	100%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	PROGNOSIS CAPAIAN VOLUME	PROGNOSIS CAPAIAN (%)
	Administrasi	PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya	10 Orang	10 Orang	100%
4	Meningkatnya efektivitas Penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan	Kasus tindak pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P.21	32 Kasus	32 Kasus	100%
		Kapasitas PPNS LHK yang ditingkatkan	5 Orang	5 Orang	100%
		Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani	2 perkara	1 perkara	50%

## B. Capaian Serapan Anggaran

### 1. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2020-2022

Pagu alokasi anggaran BPPHLHK Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 berfluktuatif. Pada Tahun 2021, pagu anggaran berkurang karena dipengaruhi oleh covid-19. Capaian serapan anggaran BPPHLHK Jawa Bali dan Nusa Tenggara antara Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

Tabel 8 Capaian Serapan Anggaran Tahun 2020-2022

TAHUN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	REALISASI (%)
2020	44,426,970,000	44,306,178,080	99.73
2021	35,617,670,000	35,517,821,266	99.72
2022	41,185,745,000	41,157,228,892	99.93



Gambar 16 Grafik Capaian Serapan Anggaran Tahun 2020 – 2022

## 2. Prognosis Serapan Anggaran Tahun 2023

Prognosis serapan anggaran adalah perkiraan capaian realiasi anggaran sampai dengan akhir Tahun 2023. Prognosis serapan anggaran dibuat dengan memperhitungkan penanganan kasus luar biasa, *Automatic Adjustment* dan juga penambahan anggaran PNBPN yang diikuti dengan penambahan target.

Pada awal Tahun 2023, anggaran BPPHLHK Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara sebagaimana yang telah tertuang dalam DIPA adalah sebesar Rp. 47.376.723.000,- (Empat Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah). Namun setelah melalui beberapa kali perubahan/penghematan/penyesuaian, BPPHLHK Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara akhirnya mendapat alokasi anggaran dalam DIPA Tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 56.921.723.000,- (Lima Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah), dengan rincian sebagaimana Tabel 9 di bawah ini :

Tabel 9 Rekapitulasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPPHLHK Wilayah Jabalnusra Tahun 2023

PROGRAM	KEGIATAN	KRO	RO	ANGGARAN (Rp)	
				SEMULA	MENJADI
Kualitas Lingkungan Hidup	Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Penanganan Perkara	Sengketa Lingkungan Hidup yang Ditangani	0	1,773,875,000



PROGRAM	KEGIATAN	KRO	RO	ANGGARAN (Rp)	
				SEMULA	MENJADI
	Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi (5430)	Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Peningkatan Kapasitas PPLH	100,000,000	50,000,000
		Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	Pengawasan Ketaatan LHK terhadap Badan Usaha	3,245,500,000	3,618,200,000
	Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan (5431)	Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Peningkatan Kapasitas PPNS	20,000,000	6,028,000
		Penanganan Perkara	Kasus Tindak Pidana LHK P21	10,440,000,000	10,861,247,000
Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Pencegahan dan Pengamanan Hutan (5428)	Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan	200,000,000	200,000,000
		Operasi Bidang Keamanan	Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	1,655,000,000	2,959,810,000
			Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	1,850,000,000	2,483,808,000
Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PHLHK (5427)	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Umum	950,000,000	3,718,950,000
			Layanan Perkantoran	28,916,223,000	28,712,373,000
			Layanan Sarana Internal	0	2,537,432,000
JUMLAH ANGGARAN				47,376,723,000	56,921,723,000

Dari pagu anggaran yang telah ditetapkan pada Tahun 2023 tersebut, realisasi anggaran sampai dengan Oktober 2023 tercapai sebesar Rp. 45.420.838.522,- (Empat Puluh Lima Milyar Empat Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) dengan persentase realisasi sebesar 79,80% dari pagu anggaran. Secara rinci pagu anggaran dan realisasi DIPA Satker BPPHLHK Jawa Bali Nusa Tenggara Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 10 Anggaran dan Realisasi DIPA BPPHLHK Wilayah Jabalnusra Tahun 2023 per Oktober 2023

MAK		IKK	TAHUN 2023		
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
5427	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I (Layanan Perkantoran)	3,718,950,000	2,338,980,128	62.89
5427	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Satker UPT (Layanan Umum)	28,712,373,000	24,830,192,252	86.48
5427	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Satker UPT (Layanan Sarana Internal)	2,537,432,000	2,478,067,292	97.66
5428	QHB	Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	2,959,810,000	1,978,425,707	66.84
5428	QHB	Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	2,483,808,000	1,795,508,089	72.29
5428	DCE	Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan	200,000,000	35,264,360	17.63
5429	QCE	Sengketa Lingkungan Hidup yang Ditangani	1,773,875,000	856,135,521	48.26
5430	DCE	Peningkatan Kapasitas PPLH	50,000,000	10,233,412	20.47
5430	QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga/Badan Usaha	3,618,200,000	3,149,101,207	87.04
5431	DCE	Peningkatan Kapasitas PPNS	6,028,000	6,027,668	99.99
5431	QCE	Kasus Tindak Pidana P.21	10,861,247,000	7,942,902,886	73.13
JUMLAH			56,921,723,000	45,420,838,522	79.80

Prognosis capaian realisasi anggaran sampai dengan akhir Desember 2023 adalah sebesar 99,28% dengan rincian realisasi untuk masing-masing jenis belanja sebagaimana pada tabel 11 berikut:



Tabel 11 Prognosis Realisasi Anggaran Menurut Jenis Belanja Sampai dengan Akhir Desember 2023

No.	Kode	Nama Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
1	51	BELANJA PEGAWAI	23,200,000,000	22,800,000,000	98,28
2	52	BELANJA BARANG	25,132,641,000	25,120,074,679	99,95
3	53	BELANJA MODAL	8,589,082,000	8,589,000,000	99,99
JUMLAH			56,921,723,000	56,509,074,679	99,28



## BAB III

# RENCANA KERJA TAHUN 2024

### A. Strategi Dalam Mendukung Program KLHK dan Program Prioritas Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024 merupakan penjabaran Tahun terakhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan melatarbelakangi komitmen pemerintah untuk mengutamakan pencapaian target – target pembangunan pada Tahun 2024 sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024 memberikan arahan pelaksanaan pembangunan nasional melalui (1) kebijakan prioritas nasional yang komperhensif dan sistematis, (2) kerangka pendanaan, (3) kerangka kelembagaan, (4) kerangka regulasi, serta (5) kerangka evaluasi dan pengendalian.

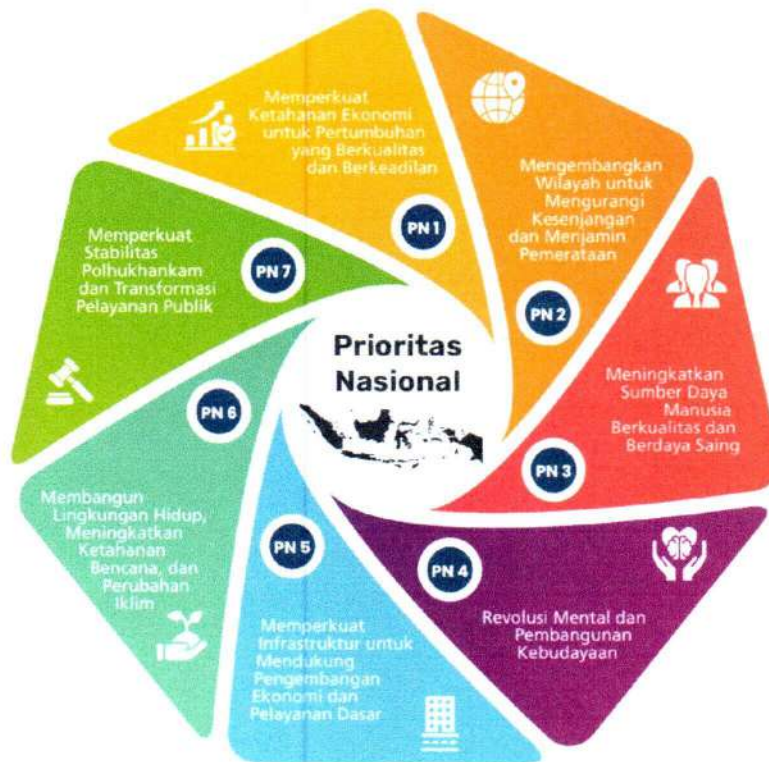
Tema RKP 2024 “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” memuat 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) seperti yang dijabarkan pada gambar 17 berikut.

#### Kerangka Pikir Tema RKP Tahun 2024



Gambar 17 Kerangka Pikir Tema RKP Tahun 2024 (RKP Bappenas, 2023)

### Prioritas Nasional RKP Tahun 2024



Gambar 18 Prioritas Nasional Tahun 2023 (RKP Bappenas, 2023)

Dari 7 (tujuh) agenda Prioritas Nasional (PN), Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan dan unit yang berada di bawahnya termasuk BPPHLK Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara mendukung PN 6 yaitu membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

PN 6 ini kemudian dijabarkan lagi melalui Kegiatan Prioritas (KP 4) pada PP1 yaitu Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di bidang SDA dan LH. Dari KP 4, BPPHLK Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara berperan pada proyek Prioritas Nasional 2



Gambar 19 Prioritas Nasional Tahun 2023 (RKP Bappenas, 2023)

yaitu Penguatan sistem Perizinan, Pengawasan dan Pengamanan Pengelolaan SDA dan LH serta Proyek Prioritas Nasional 3 Penguatan Mekanisme Pidana, Perdata, dan Mediasi dalam Proses Penegakan Hukum Bidang SDA dan LH.

Untuk mendukung terlaksananya Prioritas Nasional 6 dan proyek prioritas nasional, BPPHLHK Wilayah Jawa, Bali, Nusa dan Tenggara sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup (PHLHK) KLHK Tahun 2023 mengikuti arahan kebijakan Prioritas Nasional yang tercantum di dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah di Tahun 2024. Beberapa strategi yang akan dilaksanakan oleh BPPHLHK Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara untuk mendukung tercapainya Prioritas Nasional dan program nasional dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 20 Strategi BPPHLHK Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara

## B. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan, Output, Lokasi dan Komponen

Pada Tahun 2024 Rincian Kegiatan, Sasaran Kegiatan, IKK, Output, Lokasi dan komponen BPPHLHK Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara tidak jauh berbeda dengan Tahun 2023. Yang berbeda adalah jumlah target dan juga anggaran untuk masing-masing output yang terkait dengan prioritas nasional. Adapun rincian target untuk Tahun 2024 khususnya yang terkait dengan Proyek Prioritas Nasional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 12 Proyek Prioritas Nasional BPPHLK Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	OUTPUT	TARGET	SATUAN TARGET
Program: Kualitas Lingkungan Hidup				
Kegiatan : Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup				
Meningkatnya perkara sengketa lingkungan hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan	Jumlah Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan	Penanganan perkara	2	Perkara
Kegiatan : Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi				
Meningkatnya ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan yang diawasi terhadap peraturan perundang-undangan bidang LHK	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang LHK	Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	124	Badan Usaha
Kegiatan : Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan				
Meningkatnya kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai P21	Jumlah kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P-21/berkas perkara dinyatakan lengkap	Penanganan Perkara	40	Perkara



SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	OUTPUT	TARGET	SATUAN TARGET
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan				
Kegiatan : Pencegahan dan Pengamanan LHK				
Meningkatnya operasi pengamanan hutan, perusakan lingkungan, hidup dan peredaran hasil hutan	Meningkatnya operasi pengamanan hutan, perusakan lingkungan hidup dan peredaran hasil hutan	Jumlah operasi pengamanan hutan dan penindakan perusakan lingkungan hidup	15	Operasi
		Jumlah operasi pembalakan liar, tumbuhan dan satwa liar	15	Operasi
		Jumlah POLHUT yang ditingkatkan kapasitasnya	15	Orang

Selain Prioritas Nasional, BPPHLK Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara juga mempunyai sasaran kegiatan, IKK dan output yang tidak termasuk di dalam Prioritas Nasional sebagaimana dalam tabel 13 berikut.

Tabel 13 Proyek Non-Prioritas Nasional BPPHLK Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	TARGET	SATUAN
Program: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya				
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Nilai Kinerja Anggaran (NKA)	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Internal	1	Layanan
		Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1	Layanan

Detil matrik rincian Kegiatan, Sasaran Kegiatan, IKK, Output, Lokasi dan komponen kegiatan dapat dilihat pada tabel 14 berikut:



Tabel 14 Rincian Kegiatan BPPHLK Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara Tahun 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KRO	RO	KOMPONEN	TARGET DAN SATUAN	ANGGARAN
Program: Kualitas Lingkungan Hidup							
<b>Kegiatan : Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup</b>							
1	Meningkatnya perkara sengketa lingkungan hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan	Jumlah Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan	Penanganan Perkara	Sengketa Lingkungan Hidup yang ditangani	051. Verifikasi dan Klarifikasi Perkara Sengketa LH 052. Penghitungan Kerugian LH/Masyarakat 053. Negosiasi dan Fasilitasi Kesepakatan	2 perkara	Rp. 580.000.000
<b>Kegiatan : Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi</b>							
2	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan yang diawasi terhadap peraturan perundang- undangan bidang LHK	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Perundang- undangan Bidang LHK	Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	Badan usaha yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Perundang- undangan	051. Penanganan Pengaduan Perusahaan 052. Penanganan Pengaduan Non-Perusahaan 053. Pengawasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	124 Badan Usaha	Rp. 3.546.240.000
<b>Kegiatan : Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan</b>							
3	Meningkatnya kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P21	Jumlah kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P-21/berkas perkara dinyatakan lengkap	Penanganan Perkara	Kasus Tindak Pidana LHK P21	051. Pengumpulan Bahan dan Keterangan atas Dugaan Tindak Pidana LHK 052. Penyidikan Kasus Tindak Pidana LHK 053. Pra peradilan Kasus Tindak Pidana LHK	40 Perkara	Rp. 9.920.900.000



NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KRO	RO	KOMPONEN	TARGET DAN SATUAN	ANGGARAN
Program: Pengelolaan Hutan Berkelanjutan							
Kegiatan : Pencegahan dan Pengamanan LHK							
4	Meningkatnya operasi pengamanan hutan, perusakan lingkungan hidup dan peredaran hasil hutan	Jumlah Polhut yang ditingkatkan kapasitasnya	Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Polisi Kehutanan yang ditingkatkan kapasitasnya	051. Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan	15 Orang	Rp. 10.041.087.000
					051. Pengumpulan Data dan Informasi Ancaman dan Gangguan Kawasan Hutan	15 Operasi	
		Jumlah operasi pengamanan hutan dan penindakan kerusakan lingkungan hidup	Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam	Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	052. Operasi Pemulihan Keamanan Kawasan Hutan	15 Operasi	
Jumlah operasi pembalakan liar, tumbuhan dan satwa liar	Operasi Peredaran Hasil Hutan Ilegal	051. Pengumpulan Data dan Informasi Peredaran Hasil Hutan Ilegal					
Program: Dukungan Manajemen							
Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan							
5	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Ditjen Gakkum LHK	Nilai Kinerja Anggaran (NKA)	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Umum	053. Layanan Dukungan Manajemen Satter	95.53	Rp. 46.902.823.000
					001. Gaji dan tunjangan	Layanan Perkantoran	

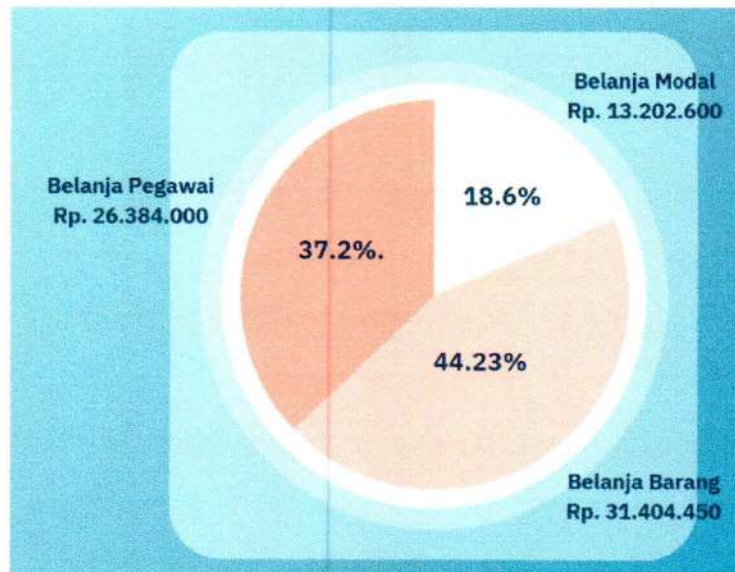


NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KRO	RO	KOMPONEN	TARGET DAN SATUAN	ANGGARAN
			Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan Sarana Internal	002. Operasional dan Pemeliharaan Kantor 051. Pengadaan Kendaraan Bermotor 052. Pengadaan Perangkat Pengolah Data 053. Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran 054. Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan		



## C. PENDANAAN TAHUN 2024

Total pagu alokasi untuk Tahun Anggaran 2024 pada BPPHLHK Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara adalah sebesar Rp. 70.991.050.000 (tujuh puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta dan lima puluh ribu rupiah). Dari jumlah pagu tersebut, struktur anggaran berdasarkan jenis belanja dapat dilihat pada gambar berikut:

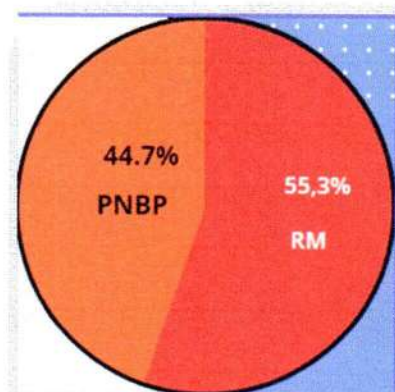


Gambar 21 Struktur Anggaran BPPHLHK Jawa, Bali, Nusa Tenggara TA. 2024

Apabila dikategorikan berdasarkan sumber dananya, maka struktur anggaran BPPHLHK Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara dapat dilihat dari tabel 15 dan gambar 22 berikut:

Tabel 15 Anggaran Th. 2024 Berdasarkan Sumber Dana

Rupiah Murni (RM)	PNBP
Rp. 39.281.310.000	Rp. 31.709.740.000
<b>Pagu Total</b>	<b>Rp. 70.991.050.000</b>



Gambar 22 Struktur Anggaran BPPHLHK Wilayah Jabalnusra TA. 2024 Berdasarkan Sumber Dana



Pembagian pagu anggaran untuk masing-masing Klasifikasi Rincian Output (KRO) adalah sebagai berikut:

Tabel 16 Pagu Alokasi Tahun 2024 BPPHLHK Wilayah Jabalnusra per-KRO

KODE KEGIATAN	KRO	ALOKASI ANGGARAN (Rp.)
5429.QCE	Penanganan Perkara	580.000.000
5430.QIH	Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	3.546.240.000
5431.QCE	Penanganan Perkara	9.920.900.000
5428.DCE	Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	200.000.000
5428.QHD	Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam	9.841.087.000
5427.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	33.700.223.000
5427.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	13.202.600.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>70.991.050.000</b>

## BAB IV

# PENUTUP

Rencana Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara Tahun 2024 ini tak hanya berisi semangat untuk memperkuat apa yang telah dicapai di Tahun 2023, namun demikian di dalamnya memuat komitmen meletakkan landasan pencapaian pembangunan Tahun 2024. Rencana Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara Tahun 2024 telah memasukkan Indikator Kinerja yang ditetapkan dan disusun berdasarkan evaluasi, arahan, dan masukan untuk pembangunan satu tahun mendatang, dan titik awal pelaksanaan RPJMN, Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PHLHK) KLHK Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara Tahun 2020-2024.

Rencana Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara merupakan panduan pengelola dalam menjalankan pengelolaan kegiatan dan anggaran dalam setahun ke depan. Rencana pengelolaan yang dimaksud berisi kegiatan-kegiatan yang direncanakan dan telah disesuaikan dengan kondisi yang ada sehingga secara adaptif dapat diimplementasikan di lapangan.

Rencana Kerja Tahun 2024 ini dapat tercapai apabila kondisi usulan anggaran ini disetujui tanpa ada kendala pencairan dana, pemotongan anggaran ataupun pencadangan anggaran *Automatic Adjustment* dari awal pelaksanaan.

Perlu disadari bahwa Rencana Kerja ini bukanlah merupakan dokumen yang sempurna dan tanpa kelemahan. Oleh sebab itu saran dan masukan sangat diperlukan untuk penyempurnaan penyusunan Rencana Kerja tahun berikutnya.



# LAMPIRAN



MATRIKS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KRO	RO	LOKASI	KOMPONEN	TARGET DAN SATUAN	ANGGARAN
Program: Kualitas Lingkungan Hidup								
Kegiatan : Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup								
1	Meningkatnya perkara sengketa lingkungan hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan	Jumlah Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan	Penanganan Perkara	Sengketa Lingkungan Hidup yang ditangani	Pulau Bawean dan Pandeglang	051. Verifikasi dan Klarifikasi Perkara Sengketa LH 052. Penghitungan Kerugian LH/Masyarakat 053. Negosiasi dan Fasilitasi Kesepakatan	2 perkara	Rp. 580.000.000
Kegiatan : Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi								
2	Meningkatnya ketepatan pelaku usaha dan/atau kegiatan yang diawasi terhadap peraturan perundang-undangan bidang LHK	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang LHK	Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	Badan usaha yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan	Bekasi,DIY, Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur , Nusa Tenggara Barat, Bali	051. Penanganan Pengaduan Perusahaan 052. Penanganan Pengaduan Non-Perusahaan 053. Pengawasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	124 Badan Usaha	Rp. 3.546.240.000
Kegiatan : Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan								
3	Meningkatnya kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang	Jumlah kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang	Penanganan Perkara	Kasus Tindak Pidana LHK P21	TN. Baluran, Malang, Surabaya, Solo, Yogyakarta,	051. Pengumpulan Bahan dan Keterangan atas Dugaan Tindak Pidana LHK 052. Penyidikan Kasus Tindak Pidana LHK	40 Perkara	Rp. 9.920.900.000



NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KRO	RO	LOKASI	KOMPONEN	TARGET DAN SATUAN	ANGGARAN
	diselesaikan sampai dengan P21	diselesaikan sampai dengan P-21/berkas perkara dinyatakan lengkap			P. Dompu, P. Sumbawa, P. Lombok, Jawa Barat	053. Pra peradilan Kasus Tindak Pidana LHK 054. Fasilitas Penanganan Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan 055. Dukungan Teknis Penegakan Hukum Pidana Lingkungan		
Program: Pengelolaan Hutan Berkelanjutan								
Kegiatan : Pencegahan dan Pengamanan LHK								
4	Meningkatnya operasi pengamanan hutan, perusahaan lingkungan hidup dan peredaran hasil hutan	Jumlah Polhut yang ditingkatkan kapasitasnya Jumlah operasi pengamanan hutan dan penindakan kerusakan lingkungan hidup Jumlah operasi pembalakan liar, tumbuhan dan satwa liar	Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam	Polisi Kehutanan yang ditingkatkan kapasitasnya Operasi Pengamanan Kawasan Hutan Operasi Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jakarta, Gn. Gedhe Pangrango, Merapi, Karimun Jawa, TN Baluran, Bali, Bali Barat, Pulau Komodo dan Gn. Rinjani, Gn. Bromo, Semarang	051. Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan 051. Pengumpulan Data dan Informasi Ancaman dan Gangguan Kawasan Hutan 052. Operasi Pemulihan Keamanan Kawasan Hutan 051. Pengumpulan Data dan Informasi Peredaran Hasil Hutan Ilegal 052. Sosialisasi dan Kerjasama Pencegahan dan Pengamanan Hutan	15 Orang 15 Operasi 15 Operasi	Rp. 10.041.087.000
Program: Dukungan Manajemen								



NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KRO	RO	LOKASI	KOMPONEN	TARGET DAN SATUAN	ANGGARAN
<b>Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan</b>								
5	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Ditjen Gakkum LHK	Nilai SAKIP Ditjen Gakkum LHK Level Maturitas SPIP Ditjen Gakkum Laporan Keuangan Ditjen Gakkum	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Umum  Layanan Perkantoran	Jawa, Bali dan Nusa Tenggara	053. Layanan Dukungan Manajemen Sather 001. Gaji dan tunjangan  002. Operasional dan Pemeliharaan Kantor 051. Pengadaan Kendaraan Bermotor 052. Pengadaan Perangkat Pengolah Data 053. Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran 054. Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	1 layanan        1 layanan	Rp. 46.902.823.000

